

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Repitamala

Universitas Kuningan, repitamala50@gmail.com

Neni Nurhayati

neni.nurhayati@uniku.ac.id

Syahrul Syarifudin

syahrul.syarifudin@uniku.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian_ ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada desa di Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis dan Kecamatan Nusaherang.

Desain/Metode_ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah desa di Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis dan Kecamatan Nusaherang sebanyak 64 desa. Sampel yang diambil sebanyak 129 responden dengan proporsional sampling dimana sampel tersebut tidak diambil secara keseluruhan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi berganda.

Temuan_ Berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Implikasi_ Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti penyajian laporan keuangan yang baik, aksesibilitas laporan keuangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab dapat membantu membangun kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

***Originalitas**_Penelitian ini menggunakan variabel dependen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal, dan variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.*

***Tipe Penelitian**_Studi Empiris*

***Kata Kunci** : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Sistem Pengendalian dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*

I. Pendahuluan

Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan pada Pemerintah pusat, namun juga tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk yang ada di lingkup Pemerintah Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan desa meliputi (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, dan (5) Pertanggungjawaban. Namun, pada tahap perencanaan tidak sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan, di kabupaten Kuningan sendiri tidak semua desa memiliki perencanaan yang baik. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa ada beberapa desa di kabupaten Kuningan yang menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa) tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Mengakibatkan sering dikembalikannya RAPB Desa oleh pemerintah tingkat kecamatan untuk diperbaiki kembali dikarenakan belum relevan dan belum lengkap. Selain itu regulasi penyusunan RAPB Desa yang datangnya kemudian hari menjadi kendala sehingga pemerintah desa harus menyesuaikan dengan regulasi baru.

Berdasarkan data penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran dana desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp. 32,3 miliar. Lalu pada tahun 2020, 129 kasus dengan 172 tersangka. Selain itu, berdasarkan catatan ICW tahun 2021 menyatakan bahwa ap arat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi yang banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni dengan sebanyak 154 kasus di sektor anggaran dana desa dengan jumlah tersangka 245 orang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 233 miliar. Lalola mengatakan tindak pidana korupsi memang rentan terjadi di sektor tersebut karena anggaran dana desa bernilai besar. Misalnya pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp. 68 triliun. Ia pun mengatakan tren korupsi di sektor anggaran dana desa dengan para pelaku yang berada di pemerintah desa semakin meningkat sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan. (<https://m.merdeka.com>).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2009) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dikatakan akuntabel dapat dilihat dari empat indikator akuntabilitas yaitu (1) Kejujuran dan Hukum, (2) Manajerial, (3) Program, (4) Kebijakan. Namun, didalam prakteknya pada indikator Kejujuran dan Hukum belum sesuai dengan situasi yang terjadi di lapangan sehingga pengelolaan keuangan desa belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media-media mengenai kepala desa di salah satu desa di kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan diduga korupsi Anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Anggaran Pengerasan atau Betonisasi senilai 170 Juta, tetapi terealisasi pengalokasiannya hanya 120 Juta (intelmedia.co). Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) di salah satu desa di kecamatan Kramatmulya (www.jurnalindonesia.com). Kesra di salah satu desa di kecamatan Cidahu diduga ada niatan menggelapkan dana PMT (www.RadarNusantara.com). 2 Tahun oknum Aparat Desa pada salah satu desa di kecamatan Kalimanggis selewengkan bahan pangan non tunai (www.inilahkuningan.com). Diduga banyak penyimpangan anggaran tahun anggaran 2020-2021 di salah satu desa di kecamatan Nusaherang (www.koranmarka.com). Pelaporan Anggaran Dana Desa di salah satu desa di kecamatan Nusaherang Diduga Banyak Fiktif (www.radarnusantara.com).

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menghasilkan fakta empiris berupa model yang dapat menjelaskan 1.)Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; 2.) Pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; 3.)Pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; 4.)Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

II. Kajian Teori

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal-hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018). Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Desa

Lembaga Administrasi Negara (2015:17) mengemukakan bahwa terdapat 4 indikator dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for Probity and Legality)
2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Mardiasmo (2002), Mardiasmo (2005:10) dan Antika dkk. (2020) faktor yang mempengaruhi akuntabilitas diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan Laporan Keuangan
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan
3. Pengendalian Internal

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan desa di wilayah kecamatan Ciawigebang, kecamatan Kramatmulya, kecamatan Cidahu, kecamatan Kalimanggis dan Nusaherang dengan jumlah populasi 64 desa dengan unit analisis yaitu kepala desa, bendahara desa/kaur keuangan dan ketua BPD sehingga terdapat 192 populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel proporsi atau propotional sampel atau sampel imbanan, yang merupakan sebuah proses sampling yang memungkinkan penelitian ini dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik bersastra atau sampel wilayah, penentuan sampel minimal menggunakan rumus Slovin dengan level error 0,05 sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 129 responden.

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas (Y)	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. LAN dan BKP RI (2002:2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan Hukum 2. Manajerial 3. Program 4. Kebijakan 	Ordinal
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	Laporan keuangan merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik, untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan	Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Bastian (2006), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1.) Relevan 2.) Andal 3.) Dapat Dibandingkan 4.) Dapat Dipahami 	Ordinal

	(Mardiasmo, 2002 dalam Peggy, 2013).		
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009).	Menurut Nurmuthmainnah (2015) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi (1) terbuka dimedia massa, (2) mudah diakses, (3) ketersediaan informasi).	Ordinal
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (X3)	Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya Abdurahmat (2003:92).	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pengawasan	Ordinal

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh melalui survey dengan melakukan penyebaran angket/kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis verifikatif dan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi) sedangkan analisis statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di wilayah Kecamatan Ciawigebang, kecamatan Kramatmulya, kecamatan Cidahu, kecamatan Kalimanggis dan Nusaherang Kabupaten Kuningan. Sedangkan objek penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dominan berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 102 orang (79%) sedangkan perempuan berjumlah 27 orang (21%). Karakteristik berdasarkan usia terdiri dari usia <30 tahun sebanyak 23 orang responden (18%), usia 30-50 tahun sebanyak 74 orang responden (57%) dan usia >50 tahun sebanyak 32 orang responden (25%). Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan BPD. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja 4 responden (3%) orang bekerja <1 tahun, 65 responden (50%) orang bekerja selama 1-5 tahun, 34 responden (27%) orang bekerja selama 5-10 tahun, dan 26 responden (20%) orang bekerja selama >10 tahun.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagian besar responden memberikan penilaian atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kategori sangat tinggi yakni sebanyak 568,4 bila dikategorikan jatuh pada interval 541-644. Dan dari keseluruhan item variabel Y sebanyak 45,5% menyatakan sangat setuju, 51,24% menyatakan setuju, 5,74% menyatakan cukup, 0% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel penyajian laporan keuangan sebagian besar responden memberikan penilaian atas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada kategori sangat tinggi yakni sebanyak 576 bila dikategorikan jatuh pada interval 541-644. Dan dari keseluruhan item variabel X1 sebanyak 51,68% menyatakan sangat setuju, 43,15% menyatakan setuju, 5,18% menyatakan cukup, 0% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel aksesibilitas laporan keuangan sebagian besar responden memberikan penilaian atas aksesibilitas laporan keuangan pada kategori sangat tinggi yakni sebanyak 527,8 bila dikategorikan jatuh pada interval 541-644. Dan dari keseluruhan item variabel X2 sebanyak 48,22% menyatakan sangat setuju, 45,44% menyatakan setuju, 6,37% menyatakan cukup, 0% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan tidak setuju.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel efektivitas sistem pengendalian internal sebagian besar responden memberikan penilaian atas aksesibilitas laporan keuangan pada kategori sangat tinggi yakni sebanyak 571,875 bila dikategorikan jatuh pada interval 541-644. Dan dari keseluruhan item variabel X3 sebanyak 47,375% menyatakan sangat setuju, 48,55% menyatakan setuju, 3,8875% menyatakan cukup, 0,2% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan tidak setuju.

Hasil Analisis Data

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Penyajian Laporan Keuangan		Aksesibilitas Laporan Keuangan		Efektivitas Sistem Pengendalian Internal		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	
No item	r hitung	No item	r hitung	No item	r hitung	No item	r hitung
1	0,417	1	0,379	1	0,205	1	0,526
2	0,534	2	0,246	2	0,337	2	0,638
3	0,561	3	0,417	3	0,236	3	0,693
4	0,565	4	0,370	4	0,479	4	0,620
5	0,455	5	0,490	5	0,525	5	0,646
6	0,384	6	0,531	6	0,469	6	0,481
7	0,288	7	0,554	7	0,290	7	0,630
8	0,481	8	0,389	8	0,262	8	0,711
9	0,588	9	0,529			9	0,743
10	0,607	10	0,426			10	0,526
11	0,531						
12	0,423						

Sumber: Hasil Output IBM Statistic SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas untuk setiap item pertanyaan dari masing-masing variabel menunjukkan lebih besar dari r tabel 0,172 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Nof item	Keterangan
Penyajian Lapotran Keuangan	0,885	10	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,830	10	Reliabel
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	0,651	8	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,656	12	Reliabel

Sumber: Hasil Output IBM Statistic SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel menunjukkan keandalan tinggi karena lebih besar dari 0,172 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel sudah memenuhi kriteria reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas dengan uji Kolmogrov-Smirnov untuk masing-masing variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,560 lebih besar dari 0,05. Hal ini bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glesjer untuk masing-masing variabel kualitas diperoleh sig. 0,485, 0,205 dan 0,326 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian multikolinearitas dengan uji Variance Inflation Factor (VIF) diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel yang di uji memiliki nilai < 10. Hal ini bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian autokorelasi dengan uji Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 1,828. Apabila ingin mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka perlu mencari tabel durbin-watson nilai dL dan Du, maka nilai dL diperoleh 1,6653 dan dU diperoleh 1,7603. Sehingga dU s.d 4-Du diperoleh nilai dU nya sebesar 1,7603 s.d 2,3347 (1,7603<1,828<4-1,6653), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi karena nilai durbin-watson diantara 1,7603 s.d 2,3347.

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Multiple Regression

Model	Kefisien	t hitung	Sig.
(Constant)	8.937		
Penyajian Laporan Keuangan	0,464	4,566	0,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,306	3,892	0,001
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	0,336	4,220	0,000
Koefisien Determinasi			
Adjusted R Square (Adj.R ²)	0,792		

Sumber: Hasil Output IBM Statistic SPSS 20

Hasil perhitungan statistik diperoleh koefisien determinasi Adjust R Square sebesar 0,792, artinya sebesar 0,792 persen variasi perubahan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sedangkan 0,208 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui.

Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai t hitung untuk kualitas laporan keuangan sebesar 4,566 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,657 dan nilai sig. t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari

nilai alpha 0,05 dengan t hitung mempunyai arah koefisien positif. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai t hitung untuk kualitas laporan keuangan sebesar 3,892 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,657 dan nilai sig. t hitung sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 dengan t hitung mempunyai arah koefisien positif. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai t hitung untuk kualitas laporan keuangan sebesar 4,220 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,657 dan nilai sig. t hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 dengan t hitung mempunyai arah koefisien positif. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis pertama yang diajukan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik desa dalam menerapkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara bersama sama maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Hal ini sesuai dengan agency theory bahwa aparat desa yang bertindak sebagai agent yang harus mempertanggungjawabkan untuk melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatannya kepada bupati atau walikota dan masyarakat sebagai principal. Pihak principal tentunya akan meminta pertanggungjawaban dari agen atas semua kegiatannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Putra (2020), dan Purba dkk., 2021 yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis kedua yang diajukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik desa dalam menerapkan penyajian laporan keuangan maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam standar akuntansi pemerintah No.1, bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement). Menurut Pemendagri No. 64 tahun 2013 tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah desa disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin baik penyajian laporan keuangan, tentu akan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan

meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan teori kompetensi bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya dalam hal ini yaitu bendahara desa harus dapat memahami pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar karena suatu pemerintah desa yang baik dan benar diperlukan keuangan desa yang baik, transparan dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalia dan Rahayu (2020), Artini dan Putra (2020), Leatemia (2021), Purba, dkk. (2021), Nurfadilah dan Santoso (2022), berdasarkan penelitiannya menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis ketiga yang diajukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik desa dalam menerapkan aksesibilitas laporan keuangan maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk mengakses informasi laporan keuangan. Pemerintah desa harus membuka akses kepada stakeholders secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. Dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hal ini sesuai dengan agency theory bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Mildawati (2018), Kurniawan dan Rahayu (2019), Antika, dkk. (2020), Purba dkk., (2021), Sya'diah dkk. (2022) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis keempat yang diajukan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik desa dalam menerapkan efektivitas sistem pengendalian internal maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Efektivitas sistem pengendalian internal yang terintegrasi dapat menekan pelaku tindakan fraud dalam melakukan praktik kecurangan terhadap pengelolaan keuangan desa atau dengan kata lain semakin baik efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah, maka semakin baik upaya pencegahan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan agency theory yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan simetri informasi antara informasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku agen dalam menjalankan amanat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga terciptanya hubungan keagenan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Menurut Antika, dkk. (2020), Hasanah dkk. (2020), Purba, dkk. (2021), Suharti dan Rumsari (2021), Indriasih dkk. (2022), menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

V. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa (1.) Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (2.) Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya semakin tinggi Penyajian Laporan Keuangan, maka akan semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat Penyajian Laporan Keuangan, maka semakin rendah pula tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (3.) Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Artinya semakin tinggi Aksesibilitas Laporan Keuangan, maka semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah Aksesibilitas Laporan Keuangan, maka semakin rendah pula Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (4.) Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya semakin tinggi Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, maka semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, maka semakin rendah pula tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang hanya lingkup kecamatan sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa memperluas lingkup penelitian yang lebih luas dan menambah objek penelitian. Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah (1.) Pemerintah desa hendaknya selalu mendorong aparatur desa untuk selalu memperbaharui pengetahuan sesuai dengan bidang pekerjaannya dengan pendidikan maupun pelatihan berkelanjutan. (2.) Pemerintah desa diharapkan lebih mengoptimalkan dan meningkatkan aksesibilitas secara publik sehingga memberikan dampak baik terhadap pengguna laporan keuangan. Dengan begitu memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui keputusan yang diambil di dalam laporan keuangan. (3.) Pemerintah desa diharapkan lebih mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, pentingnya pemerintah desa untuk mengadakan bimbingan maupun pelatihan-pelatihan sistem keuangan desa bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan keuangan agar lebih efektif, sehingga dapat menciptakan akuntabilitas.

Implikasi dari penelitian ini memberikan informasi bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang baik dapat berdampak pada pelaporan keuangan desa yang akuntabel sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meskipun terdapat kasus penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa tetapi tidak semua aparatur pemerintah desa melakukan penyalahgunaan wewenang.

Daftar Pustaka

- Artini, N.L.W. and Putra, I.P.D.S. (2020) 'Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah', *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), pp. 188–218.
- Hasanah, S., Nurhayati, E. and Purnama, D. (2020) 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan', 4(1), pp. 17–27.
- Leatemia and Usmany (2021) 'Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(2), pp. 119–130.
- Rosalia, A.U., Rahayu, S. and Keuangan, A.L. (2020) 'PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019) THE EFFECT OF THE PRESENTATION OF FINANCIAL STATMENT AND ACCESSIBILITY FINANCIAL STATMENT ONRE', 7(2), pp. 3098–3105.

<https://intelmedia.co/intelmedia-kepala-desa-kadurama-kecamatan-ciawi-gebang-kabupaten-kuningan-jawa-barat-diduga-korupsi-anggaran-da.html>

<https://jurnalindonesiabarur.com/2019/01/31/l-kpk-kab-kuningan-resmi-melaporkan-dugaan-korupsi-add-kramatmulya-di-kejari/>

<https://www.radarnusantara.com/2019/07/kesra-desa-jatimulya-kec-cidahu.html?m=1>

<https://inilahkuningan.com/terbongkar-2-tahun-oknum-aparat-desa-kalimanggis-kulon-selewengkan-bpnt/>

<https://www.koranmarka.com/2021/04/di-duga-banyak-penyimpangan-anggaran.html?m=1>

<https://www.radarnusantara.com/2022/09/pelaporan-anggaran-dana-desa-kertayuga.html?m=1>